

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN  
POLITIK KEPADA PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

Intan Ravida Widianti  
NPP. 30.0550

*Asdaf Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [intanravida19@gmail.com](mailto:intanravida19@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Riyan Jaelani, S.STP, M.Tr.IP

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *Indonesia is a country that adheres to a democratic system of government. Relating to democracy, elections are also one form of implementation of democracy itself. To have the ability or ability to vote, people must be given political education. The dynamics and problems of holding the election itself will certainly have an impact on the political attitudes reflected by novice voters. Political education is certainly a solution to the existence of oblivious practices in holding general elections.* **Purpose:** *The purpose of the study was to analyze and determine the role, inhibiting and supporting factors, as well as Bawaslu's efforts in providing political education to novice voters in Bogor regency.* **Method:** *This study was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. Sampling techniques used are purposive sampling to identify informants and snowball sampling.* **Result:** *The results showed the role of Bawaslu Bogor regency in providing political education to novice voters, seen from 3 dimensions according to Levinson's theory in Soekanto went well even though there are indicators that have not been implemented in the field, namely indicators of inhibition factors and efforts made. Supporting factors consist of the synergy between Bawaslu and Kesbangpol in providing socialization for beginner voters, Bawaslu gets the opportunity to carry out socialization to the public, especially beginner voters, the existence of Bawaslu's personal website is one of the supporting factors in order to socialize elections and political education, especially beginner voters, and there are several political parties that have the awareness of providing socialization related to political education, especially beginner voters. While the inhibiting factors consist of a very large area of Bogor regency and the number of people and a very large permanent voter list, the holding of the Regency Bawaslu to the provincial Bawaslu, the large number of novice voters and limited infrastructure and time, lack of cooperation between work units and Bawaslu and lack of active participation from some political parties.* **Conclusion:** *The efforts made to overcome the obstacles that exist, namely synergizing with other work units such as the Bogor Regency Police Department, maximizing the personal website of the Bogor regency Bawaslu and continuing to carry out socialization about elections and provide political education for the community, especially for novice voters.*

**Keywords:** *Bawaslu, beginner voters, political education.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Berkaitan dengan demokrasi pemilihan umum juga adalah salah satu bentuk dari implementasi dari demokrasi itu sendiri. Untuk memiliki kemampuan atau kesanggupan dalam memilih, masyarakat harus diberikan Pendidikan politik. Adanya dinamika dan problematika dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, tentunya akan berdampak pada sikap politik yang dicerminkan oleh pemilih pemula. Pendidikan politik tentunya menjadi solusi dari adanya praktek – praktek kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. **Tujuan:** Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui peranan, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bogor. **Metode:** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan dan *snowball sampling*. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan peranan Bawaslu Kabupaten Bogor dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula dilihat dari 3 dimensi menurut teori Levinson dalam Soekanto. Faktor pendukung terdiri dari adanya sinergitas antara Bawaslu dengan Kesbangpol dalam memberikan sosialisasi bagi pemilih pemula, Bawaslu mendapatkan kesempatan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula, adanya website pribadi Bawaslu menjadi salah satu faktor pendukung guna mensosialisasikan pemilu dan pendidikan politik khususnya pemilih pemula, serta terdapat beberapa partai politik yang memiliki kesadaran memberikan sosialisasi terkait pendidikan politik khususnya pemilih pemula. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas dan jumlah masyarakat serta daftar pemilih tetap yang sangat banyak, menginduknya Bawaslu Kabupaten ke Bawaslu Provinsi, banyaknya jumlah pemilih pemula dan sarana-prasarana serta waktu yang terbatas, kurangnya kerjasama antar satuan kerja dengan Bawaslu serta kurangnya partisipasi aktif dari sebagian partai politik. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Bawaslu Kabupaten Bogor dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula dapat dikatakan berhasil selain itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu bersinergi dengan satuan kerja yang lain misalnya dengan Kesbangpol Kabupaten Bogor, memaksimalkan website pribadi Bawaslu Kabupaten Bogor dan terus melaksanakan sosialisasi mengenai pemilu dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula.

**Kata kunci : Bawaslu, pemilih pemula, pendidikan politik**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dapat dipahami dengan asas kedaulatan juga disertai dengan mekanisme pelaksanaannya, yaitu sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik sosial pemerintahan otonom dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan adat untuk melindungi hak-hak individu warga negara (Nurgiansah, 2020). Berkaitan dengan demokrasi pemilihan umum juga adalah salah satu bentuk dari implementasi dari demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum atau selanjutnya disebut dengan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada

tahun 1955. Dalam pemilihan umum di Indonesia setiap pemilih yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak satu suara dalam setiap pemilihan umum, idealnya pemilihan umum yang seperti ini diselenggarakan apabila tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi. Hal ini bertujuan agar aktor-aktor politik yang dihasilkan melalui Pemilu benar-benar individu yang berkompeten.

Untuk memiliki kemampuan atau kesanggupan dalam memilih, masyarakat harus diberikan Pendidikan politik. Pendidikan politik yang dimiliki masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Kerentanan pemilihan umum yang berpotensi menimbulkan konflik seperti pada Pemilihan Presiden tahun 2019 yang membutuhkan keterlibatan masyarakat yang cerdas. Partisipasi masyarakat bukan sekedar kontribusi terhadap hak pilih saja. Memilih pemimpin yang baik juga harus dilakukan oleh masyarakat yang cerdas, dan juga masyarakat yang cerdas lahir dari didikan politik yang cerdas, didikan politik yang baik berdasarkan keterbukaan, transparansi serta aksesibilitas yang baik (Fitri, 2018).

Kabupaten Bogor menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang mencapai 5.385.219 jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan yang terbanyak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menjadikan jangkauan dari pemerintah maupun pihak terkait dalam memberikan pendidikan politik lebih luas dibandingkan dengan daerah lainnya. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemilihan umum yang sesuai dengan harapan dilaksanakannya pemilihan umum, yakni terlahirnya aktor-aktor politik yang berkompeten. Dengan tingginya pemahaman politik yang didapatkan dari pendidikan politik maka akan berdampak pada kualitas dari pemilu itu sendiri. Pemilih pemula merupakan salah satu sasaran dari para aktor politik untuk diperebutkan suara dan dukungannya. Adanya dinamika dan problematika dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, tentunya akan berdampak pada sikap politik yang dicerminkan oleh pemilih pemula. Pendidikan politik tentunya menjadi solusi dari adanya praktek – praktek kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan pendidikan politik masyarakat tentunya diharapkan mampu untuk menjadi partisipan sekaligus pengawas dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Adapun kesenjangan yang menjadi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini berkaitan dengan budaya politik di Kabupaten Bogor sangat kental dengan praktek politik uang dan politik dinasti, hal ini sejalan dengan pernyataan dari Irvan Firmasyah selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor yang menyebutkan bahwa “Masih terdapat beberapa tugas dari kami untuk menghilangkan ataupun setidaknya mengurangi budaya politik yang berbentuk politik uang yang terbilang cukup sering terjadi”. Selain itu mengingat jumlah dari pemilih pemula ini yang cukup banyak di Kabupaten Bogor dan pengalaman atau pemahaman dalam menganalisa setiap kegiatan politik mereka yang masih rendah. Maka pendidikan politik yang menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Bogor dapat menjadi suatu urgensi untuk pemilih pemula dalam menentukan atau bersikap pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan kualitas yang baik.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Farah Diba (2021) berjudul Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Melalui Media Sosial. Hasil dari penelitian ini ialah membahas bagaimana Bawaslu Provinsi Sumatera utara yang memiliki kewajiban untuk turut serta

dalam memberikan Pendidikan kepada warga yang berkaitan dengan pemilihan umum dan media sosial yang menjadi salah satu instrument dalam pelaksanaan pengawasan. Agar Bawaslu menjadi lebih maksimal dalam mealkukan peengawasan dan juga terdapat dorongan partisipatif dari warga. Adapun program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ialah berkolaborasi dengan influencer, membuat perkumpulan untuk berdiskusi dan lain-lain.

Selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Metria Shela (2018) berjudul Peranan Bawaslu dalam Mencegah politik uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Penelitian ini memaparkan efektifitas peran Bawaslu dalam melakukan Pencegahan Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung tahun 2018, termasuk mencegah pelaksanaan praktik politik uang dengan melaksanakan Pendidikan politik serta sosialisasi serta membuka tempat aduan untuk masyarakat jika adanya praktik politik uang yang terjadi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso (2019) berjudul Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politik. Penelitian ini membahas pendidikan politik dengan membuat kampung anti politik uang agar dapat menambah kesadaran masyarakat dengan perilaku politik, bahkan dengan sumber daya manusia yang rendah. Daerah lain yang berada di Indonesia juga yang rentan terhadap politik uang juga harus mengikuti penerapan desa anti politik uang ini sebagai model Pendidikan politik yang baru dalam menciptakan demokrasi yang baik.

Terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin Tahe, H.M.Yasin dan Alwi Jaya (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. Penelitian ini membahas perihal kedudukan serta guna bawaslu Kabupaten Sinjai dalam mengimplementasikan Undang undang Nomor 7 tahun 2017 dalam pemilihan umum tahun 2019 dilihat sudah baik. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diubah dalam pemilihan umum tahun 2024, dan juga memberikan perhatian Bawaslu sendiri, dengan masih adanya politik uang, beberapa aparatur sipil negara dan juga kepala desa yang tidak netral

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan bagaimana peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun fokus yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian lainnya ialah penulis ingin menganalisis dan mengetahui peranan, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bogor. Selain itu untuk menganalisis rumusan masalah peneliti menggunakan teori Teori Peranan oleh Levinson dalam Soekanto (2012 : 212) yang mencakup 3 dimensi yakni Norma dan Aturan, Perbuatan tindakan organisasi, dan Perilaku individu atau masyarakat yang selanjutnya menghubungkannya dengan tupoksi dari Bawaslu Kabupaten Bogor untuk melihat peranan Bawaslu dalam memberikan Pendidikan politik kepada pemilih pemula.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peranan bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, selanjutnya untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, kemudian mendeskripsikan dan mengetahui upaya bawaslu dalam mengatasi faktor penghambat dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bogor.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian yang diangkat oleh penulis. Yang mana pada konteks ini ialah terkait peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Selain itu penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari perwakilan Koordinator Divisi Bawaslu (sebanyak 1 orang), kemudian Staff Bawaslu (sebanyak 1 orang), dan Pemilih pemula (sebanyak 10 orang).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Peranan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor Dalam memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula di Kabupaten Bogor.

Peneliti akan menguraikan dimensi-dimensi dari teori berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peranan badan pengawas pemilu dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan teori peranan oleh Levinson dalam Soekanto (2012:212) yang terbagi dalam 3 (tiga) dimensi yaitu Norma dan aturan, Perbuatan tindakan organisasi, dan Perilaku individu atau masyarakat.

#### a. Norma dan Aturan

Dalam dimensi norma dan aturan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor memiliki aturan-aturan yang mendasari Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula yakni seperti yang telah tertera dalam tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu. Dalam pelaksanaan aturan, Bawaslu Kabupaten Bogor dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula yakni berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya oleh Bawaslu, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan secara intens, alasannya karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh Bawaslu provinsi. Hal ini apabila dibandingkan dengan peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 terkait norma dan aturan maka Bawaslu Kabupaten Bogor telah menjalankan norma dan aturan tersebut dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula telah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

#### b. Perbuatan dan Tindakan Organisasi

Dimensi tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor terkait target yang tercapai dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula berdasar pada standar yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu telah terpenuhi alasannya karena adanya batasan target yang telah ditentukan oleh Bawaslu provinsi. Selanjutnya terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor mengenai pendidikan politik kepada pemilih pemula ialah salah satunya menjalankan kerja sama dengan Kesbangpol dan mendapatkan respon positif dari Kesbangpol sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa pada dimensi tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bogor telah berhasil mencapai target dengan mengeluarkan kebijakan berupa kerjasama dengan satuan kerja pemerintah terkait.

#### c. Perilaku Individu Atau Masyarakat

Dalam dimensi perilaku individu atau masyarakat dengan indikator partisipasi, Bawaslu Kabupaten Bogor menyatakan bahwa respon pemilih pemula terhadap pendidikan politik yang

diberikan mendapat respon yang positif. Salah satu bentuk dari upaya Pendidikan politik dari Bawaslu ialah mengadakan kegiatan sosialisasi Pendidikan politik.

Pada kegiatan ini peneliti melihat bahwa sosialisasi pendidikan politik pada pemilih pemula yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor telah berhasil mencapai indikator partisipasi yang dibuktikan dengan pernyataan antusias dan manfaat sosialisasi yang dirasakan oleh peserta sosialisasi pendidikan politik. Kemudian hal yang menjadi kendala pemilih pemula untuk mengikuti dan menerima materi pendidikan politik yang diberikan ialah kendala teknis selama pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik terhadap pemilih pemula misalnya kendala teknis seperti kurang terdengarnya informasi yang disampaikan akibat kebisingan, atau suhu yang cukup panas dalam ruangan yang membuat peserta sedikit terganggu. Meskipun begitu secara keseluruhan kegiatan mendapat antusiasme yang cukup dari peserta.

Selain itu terlihat pula dampak yang diberikan dari Pendidikan politik bagi pemilih pemula cukup dirasakan berdasarkan hasil wawancara, peserta mengakui mereka mendapat pengetahuan yang berguna dan membawa pola pikir yang lebih luas mengenai politik. Lebih jauh kegiatan sosialisasi ini memaparkan peran Bawaslu dalam pemilu khususnya dalam pengawasan, serta tantangan yang akan dihadapi dalam pemilu 2024 yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, jadi disini Bawaslu memberikan pendidikan terkait pelanggaran dalam pemilu seperti politik uang agar para pemilih pemula tidak terkecoh. Berdasarkan seluruh pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam dimensi perilaku individu atau masyarakat Bawaslu Kabupaten Bogor dapat dikatakan berhasil mencapai seluruh indikator dengan baik.

### **3.2 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Yang Mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu Dalam Memberikan Pendidikan Politik**

Bawaslu Kabupaten Bogor dalam menjalankan peranannya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan beberapa faktor penghambat yang terjadi di lapangan.

#### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat bagi Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula diantaranya:

- a. Kabupaten Bogor mempunyai wilayah yang sangat luas dengan 40 kecamatan dan jumlah masyarakat mencapai 5,3 juta jiwa. Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 3,4 juta jiwa, DPT ini menjadi salah satu objek untuk mensosialisasikan pendidikan politik yang di dalamnya ada pemilih pemula. Sehingga Bawaslu membutuhkan tenaga dan anggaran yang besar.
- b. Bawaslu Kabupaten Bogor masih menginduk ke provinsi, sehingga seluruh proker dan anggaran dana dari provinsi.
- c. Jumlah pemilih pemula yang tidak sedikit sehingga Bawaslu terkendala tempat, sarana dan waktu dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
- d. Kurangnya kerjasama atau sinergitas antar sesama satuan kerja dengan Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, sehingga Bawaslu terkendala ruang dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
- e. Kurangnya partisipasi aktif dari sebagian partai politik

#### **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung bagi Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula diantaranya:

- a. Adanya sinergitas antara Bawaslu dengan Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik atau sosialisasi bagi pemilih pemula.

- b. Bawaslu mendapatkan kesempatan melaksanakan sosialisasi atau pemberian pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dari salah satu universitas dan beberapa organisasi masyarakat.
- c. Adanya website pribadi Bawaslu menjadi salah satu faktor pendukung guna mensosialisasikan pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya pemilih pemula.
- d. Terdapat beberapa partai politik yang memiliki kesadaran dalam turut serta memberikan sosialisasi terkait pendidikan politik bagi masyarakat khususnya pemilih pemula. Sebagaimana hasil wawancara organisasi masyarakat.

### **3.3 Upaya Bawaslu Kabupaten Bogor Untuk Mengatasi Hambatan Melaksanakan Perannya Dalam Memberikan Pendidikan Politik**

Dari kendala-kendala yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dibawah ini adalah upaya yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten bogor:

1. Bersinergi dengan satuan kerja yang lain misalnya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten bogor. Hal ini sesuai hasil wawancara organisasi masyarakat.
2. Memaksimalkan website pribadi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam memberikan sosialisasi mengenai pendidikan politik bagi masyarakat umum khususnya pemilih pemula.
3. Terus melaksanakan sosialisasi mengenai pemilu dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula disaat ada peluang ruang yang menyediakan peserta dengan perantara organisasi masyarakat, universitas, beberapa parpol yang turut berpartisipasi aktif dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan data hasil wawancara Bapak Zia Deva selaku Staf Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Januari 2023 yang menyatakan sederet jadwal kegiatan sosialisasi bawaslu kepada pemilih pemula diberbagai tempat yang ada di Kabupaten Bogor.
4. Bawaslu Kabupaten Bogor mendatangkan narasumber yang berkompetensi di bidangnya sehingga informasi yang disampaikan jelas. Hal ini didukung dengan data hasil wawancara bersama Ibu Naotalia Apapyo selaku Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi pada wawancara yang dilaksanakan pada 20 Januari 2023 yang menghadirkan narasumber atau pembicara yang berkompetensi di bidangnya sehingga informasi yang disampaikan dengan baik.
5. Bawaslu Kabupaten Bogor mengemas acara sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan baik dan efektif sehingga sesuai dengan kebutuhan pemilih pemula. Hal ini didukung dengan data hasil wawancara bersama Ibu Naotalia Apapyo selaku Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi pada wawancara yang dilaksanakan pada 20 Januari 2023 yang menyatakan bahwa acara sosialisasi dikemas sesuai dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan pengamatan dan temuan yang diperoleh oleh peneliti berkaitan dengan pelaksanaan Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Memberikan Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan cukup baik. Adapun temuan utama yang menarik perhatian penulis dalam mengkaji permasalahan penelitian ialah bahwa masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait upaya Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan dengan hanya satu ruang yang baru bisa bekerjasama atau

bersinergi dengan bawaslu yakni kesbangpol, seharusnya satuan kerja yang lain seperti misalnya dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) yang nota benanya mengurus kaum muda seharusnya dapat ikut bersinergi dalam Pendidikan politik. Selanjutnya instansi lain yang berkaitan dengan kaum muda seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan juga dapat membuka ruang untuk bersinergi dengan Bawaslu Kabupaten Bogor dalam memberikan Pendidikan politik bagi pemilih pemula di sana.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yakni berkaitan dengan Peranan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula dapat dikatakan berhasil, hal ini dilihat dari tiga dimensi menurut teori Levinson dalam Soekanto yang berjalan dengan baik meski terdapat indikator yang belum terlaksana dilapangan yakni indikator faktor penghambatan dan upaya yang dilakukan. Kemudian adapun upaya bawaslu Kabupaten Bogor untuk mengatasi hambatan yakni bersinergi dengan satuan kerja yang lain misalnya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten bogor, memaksimalkan website pribadi Bawaslu Kabupaten Bogor, dan terus melaksanakan sosialisasi mengenai pemilu dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi saja yakni Bawaslu Kabupaten Bogor. Selanjutnya dikarenakan upaya Peranan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula di Kabupaten Bogor masih berjalan mungkin saja akan ada perubahan dari segi data dan perkembangan kedepannya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan upaya Peranan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula di Kabupaten Bogor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Bogor beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ambardh, K., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2019). *Kaum Demokrat Kritis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak.
- Dewantara, & Nurgiansah. (2021). Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *Jurnal Etika Demokrasi*.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Oor Indonesia.

- Fitri, A. (2018). Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 125.
- Gaffar, A. (2005). *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamsah, D. D. (2021). *Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hardin, D. R. (2022). *Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang*. Pare-pare: IAIN Pare-pare.
- Hartika, F. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Kamajaya, R. S. (2021). *Perilaku Pemilih (Studi Pilihan Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Dapil Banten III Tahun 2019)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kartono, K. (2019). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- KBBI. (2018). *Arti Kata Peran*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Ma'arif, W. S. (2022). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Volume 8, Nomor 1, Mei 2022, pp. 49-61.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mujani, S., Lidlle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat*. Jakarta : Mizan.
- Nasrullah, R. (2017). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
- Nurgiansah. (2020). Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Plano, J. C. (1985). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prabowo. (2020). *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia,.
- Ramadhani. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anank Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* .
- Rizky, M. (2021). *Perilaku Memilih Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Legislatif 2019 (Studi Kasus Kecamatan Sukarmi, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan)*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Rulli, N. (2017). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: SIMBiosa Rekatama Media.
- Sakti, B. S. (2020). Konstruksi Masyarakat Tulungagung Terhadap Calon Presiden Indonesia Priode 2014-2019. *Kajian Moral Kewarganegaan*, 91.
- Sangadji, M. (2016). *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, R. P. (2018). *Perilaku Pemilih Mahasiswa/i UIN Raden Fatah Palembang Pada PIlpres 2014*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Shabrina, S. I. (2018). *Pengaruh Keluarga Terhadap Perilaku Politik Dilihat Dari Latar Belakang Keluarga Dan Sosialisasi Politik Dalam Keluarga*. Jakarta: UIN Syarif Hidyatullah Jakarta.

- Siagian. (2018). Peranan Disiplin Kerja Dan Kompensasi Dalam Mendeterminasi Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Cahaya Pulau Pura Di Kota Batam. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*.
- Sinulingga, S. (2018). *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.
- Soekanto. (2018). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and development / R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supradono, B., & Hanum, A. (2018). Peran Sosial Media Untuk Manajemen Hubungan Dengan Pelanggan pada layanan E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sutrisman, D. (2020). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Bandung: Guepedia Publisher.
- Umar, H. (2015). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Undang – Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Bab IV Pasal 19 Tentang Pemilih Pemula
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Woolley. (2018). The 2008 Presidential Election, 2.0: A Content Analysis of User-Generated Political Facebook Groups. *Mass Communication and Society*.
- Yandwiputra, A. R. (2020, 12 16). *Pilkada Depok 2020, KPU: Partisipasi Naik Meski di Tengah Pandemi Covid-19*. Retrieved from Metro.Tempo: <https://metro.tempo.co/read/1414974/pilkada-depok-2020-kpu-partisipasi-naik-meski-di-tengah-pandemi-covid-19>

